



Analisis Input-Output Dampak Fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor DTP Tahun 2021 terhadap Penggandaan Output dan Kesempatan Kerja

Input-Output Analysis of the Impact of the 2021 Government-Borne Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) Incentive for Motor Vehicles on Output Multipliers and Employment

Nico Wahyudi

Kementrian Keuangan, Indonesia

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada sektor otomotif yang mengalami penurunan kinerja secara tajam akibat melemahnya daya beli masyarakat. Untuk mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bagi kendaraan bermotor pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap penggandaan output perekonomian serta penciptaan kesempatan kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis input-output dengan memanfaatkan Tabel Input-Output Indonesia tahun 2016 yang diagregasi menjadi 17 sektor ekonomi. Dampak kebijakan dianalisis melalui simulasi shock permintaan akhir yang berasal dari estimasi peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang memperoleh fasilitas PPnBM DTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan permintaan akhir sebesar Rp45,40 triliun pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menghasilkan tambahan total output perekonomian sebesar Rp65,28 triliun. Selain itu, dampak pengganda dari kebijakan tersebut juga mampu menciptakan 567.154 kesempatan kerja baru di berbagai sektor ekonomi. Kontribusi terbesar terjadi pada sektor perdagangan otomotif, dengan efek rambatan (spillover) yang signifikan pada sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPnBM DTP tahun 2021 memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja selama periode pemulihan ekonomi pascapandemi.

Kata kunci: PPnBM DTP; Analisis Input-Output; Multiplier Output; Kesempatan Kerja; Kebijakan Fiskal.

Abstract

The COVID-19 pandemic significantly affected Indonesia's economy, particularly the automotive sector, which experienced a sharp decline due to weakened consumer purchasing power. To support economic recovery and stimulate domestic demand, the government implemented a policy in 2021 providing a Government-Borne Luxury Goods Sales Tax incentive (PPnBM DTP) for motor vehicles. This study aims to analyze the impact of this policy on economic output multipliers and employment creation in Indonesia. This research employs an input-output analysis using the 2016 Indonesian Input-Output Table, which is aggregated into 17 economic sectors. The policy impact is examined through a simulation of a final demand shock derived from the estimated increase in motor vehicle sales benefiting from the PPnBM DTP incentive. The results indicate that an increase in final demand of IDR 45.40 trillion in the wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles sector generates an additional total economic output of IDR 65.28 trillion. Furthermore, the policy's multiplier effect is estimated to create 567,154 new employment opportunities across various economic sectors. The largest contribution occurs in the automotive trade sector, with significant spillover effects to the manufacturing industry, financial and insurance services, and transportation and warehousing sectors. These findings suggest that the 2021 PPnBM DTP incentive policy played an important role in stimulating economic activity and increasing employment absorption during the post-pandemic economic recovery period.

Keywords: Ppnbm DTP; Input-Output Analysis; Output Multiplier; Employment Creation; Fiscal Policy.

How to Cite: Wahyudi, N. (2026). Analisis Input-Output Dampak Fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor DTP Tahun 2021 terhadap Penggandaan Output dan Kesempatan Kerja. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 8 (1): 22-35

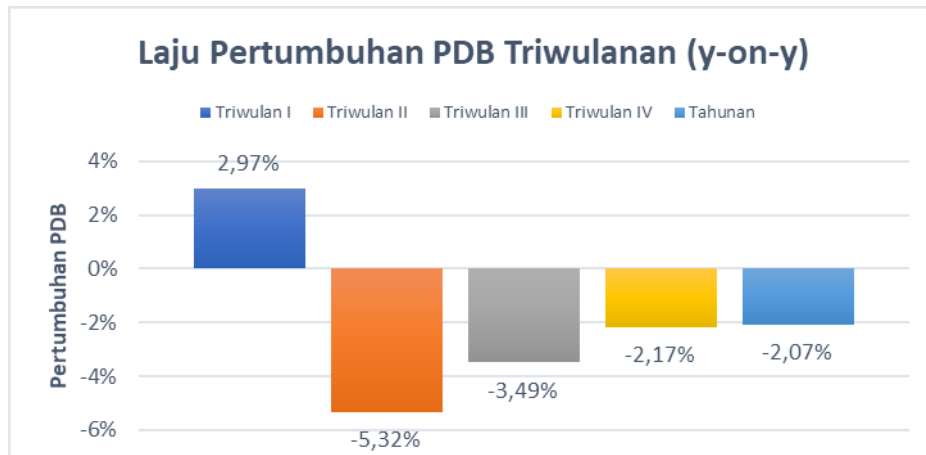
*E-mail: nicowahyudi21@gmail.com

ISSN 2721-7507 (Online)



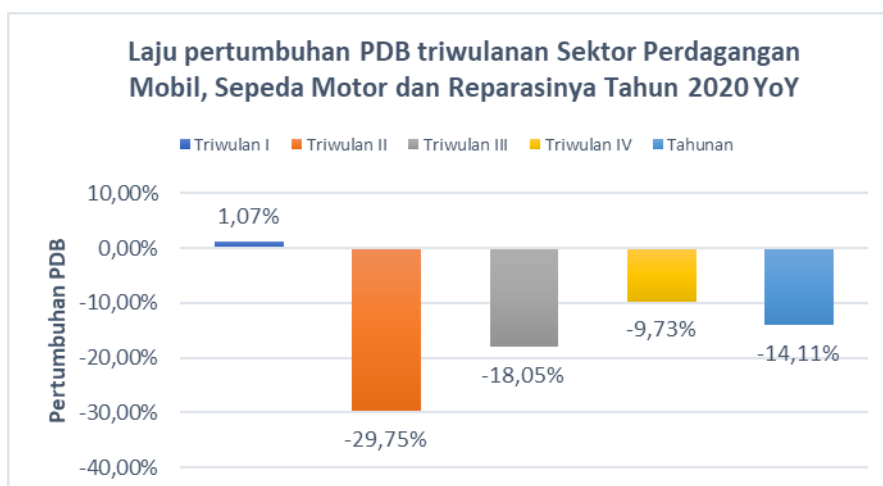
PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan luka yang sangat mendalam pada dunia. Tidak hanya jutaan korban jiwa, Pandemi Covid-19 berperan besar dalam bertambahnya populasi miskin di bumi (Asare Vitenu-Sackey & Barfi, 2021). Pernyataan tersebut divalidasi oleh Legese Feyisa (2020) yang melaporkan pengaruh signifikan Pandemi Covid-19 terhadap variabel fundamental ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Perekonomian Indonesia pun tidak luput dari dampak yang ditimbulkan Pandemi Covid-19. Tercatat pada 2020 lalu perekonomian Indonesia tumbuh minus sebesar -2,07% sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulanan 2020 YoY
Sumber: Diolah dari BPS (2022)

Dampak Pandemi Covid-19 pada masing-masing sektor perekonomian tersebar secara beragam. Salah satu sektor ekonomi paling terdampak adalah perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya (BPS, 2022). Pada grafik 2 dapat diamati bahwa pada triwulan dua 2020 pertumbuhan PDB sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya bahkan sempat menyentuh -29,75% sebelum akhirnya secara tahunan ditutup pada angka -14,11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor otomotif sangat sensitif terhadap perubahan daya beli masyarakat serta pembatasan mobilitas ekonomi selama masa pandemi.



Grafik 2. Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya Tahun 2020 YoY
Sumber: Diolah dari BPS (2022)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini kemudian dicabut oleh PMK Nomor 31/PMK.010/2021 yang kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 120/PMK.010/2021. Peraturan-peraturan ini diterbitkan dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha industri kendaraan bermotor dan meningkatkan daya beli masyarakat pada sektor tersebut (Kementerian Keuangan, 2021a, 2021b, 2021c). Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal ekspansif pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi domestik.

Kebijakan pemberian fasilitas fiskal dalam bentuk fasilitas PPnBM kendaraan bermotor ditanggung pemerintah (DTP) menuai reaksi beragam dalam masyarakat. Omar Abdillah, dalam Setiawan (2021), menyebutkan bahwa berdasarkan hasil analisis sentimen konsumen di media sosial Twitter, sebanyak 72% konsumen menyambut baik pemberian fasilitas ini sementara 28% memiliki pandangan negatif. Dari 28% pandangan negatif tersebut, 61% berpandangan bahwa kebijakan ini berisiko pada kinerja pendapatan pajak, 28% berpandangan kebijakan ini akan menambah kemacetan dan sebesar 11% berpandangan bahwa kebijakan ini bersifat elitis dan diskriminatif. Ragam sentimen masyarakat ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana dampak riil yang ditimbulkan oleh kebijakan pemberian fasilitas PPnBM kendaraan bermotor ditanggung pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan insentif PPnBM DTP masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian empiris yang lebih komprehensif mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Berbagai penelitian terhadap pemberian fasilitas PPnBM kendaraan bermotor ditanggung pemerintah (DTP) telah dilakukan sebelumnya. Samudra dan Wibowo (2022) menemukan bahwa Insentif PPnBM kendaraan bermotor DTP berpengaruh positif terhadap penjualan mobil. Varian mobil yang mendapatkan insentif PPnBM DTP mengalami peningkatan penjualan dibandingkan sebelum mendapatkan insentif. Temuan senada dilaporkan oleh Pratama dan Rezki (2022) yang menemukan bahwa kebijakan insentif PPnBM kendaraan bermotor DTP memberikan dampak positif pada kenaikan penjualan kendaraan sebesar 46,1% dalam jangka pendek, tetapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Indonesia dalam jangka panjang selama kebijakan itu dilaksanakan.

Beberapa penelitian juga menekankan bahwa regulasi (PPN dan PPnBM) mempengaruhi perilaku konsumsi kendaraan bermotor oleh konsumen. Anggraeni dan Mudiarti (2022) menemukan bahwa regulasi PPN dan PPnBM berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mobil. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Siahaan (2022) atas penelitiannya terhadap konsumen PT. Astra Internasional Tbk Medan.

Penulis menemukan satu literatur yang menguji dampak fasilitas PPnBM terhadap sektor lainnya (selain sektor otomotif). Almira dan Wiagustini (2022) mengemukakan bahwa insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor DTP berpengaruh positif dan signifikan pada membaiknya kinerja keuangan perusahaan pembiayaan. Temuan Almira dan Wiagustini menunjukkan dampak fasilitas PPnBM yang berkaitan dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dari sektor otomotif yaitu sektor pembiayaan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan PPnBM DTP, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak mikro seperti peningkatan penjualan kendaraan atau perilaku konsumsi konsumen. Kajian yang menganalisis dampak kebijakan ini terhadap perekonomian secara lebih luas, khususnya terhadap

penggandaan output ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja antar sektor, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis input-output untuk mengkaji dampak kebijakan PPnBM kendaraan bermotor DTP terhadap perekonomian nasional secara lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan analisis keterkaitan antar sektor ekonomi sehingga dapat mengidentifikasi efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan oleh kebijakan fiskal tersebut.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai bagaimana dampak pemberian fasilitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor terhadap perekonomian nasional. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap output Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta bagaimana pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor ekonomi.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian fasilitas PPnBM kendaraan bermotor DTP terhadap output perekonomian nasional dan terhadap penyerapan tenaga kerja antar sektor ekonomi. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diketahui sejauh mana kebijakan fiskal berupa insentif pajak ini mampu mendorong aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesempatan kerja.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan awal (early findings) bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PPnBM kendaraan bermotor DTP. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang sejenis di masa mendatang. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran makro mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap aktivitas perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat analisis berupa analisis input-output. Tabel input-output yang digunakan adalah tabel input-output Indonesia tahun 2016 dengan agregasi 17 sektor ekonomi atas dasar harga dasar, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan tabel input-output 17 sektor tentu memiliki keterbatasan dalam tingkat disagregasi sektor dibandingkan tabel input-output 52 sektor atau 185 sektor ekonomi, namun penulis menjustifikasi penggunaan tabel ini dengan mempertimbangkan kemudahan komputasi, kesesuaian dengan ketersediaan data tenaga kerja, serta kebutuhan analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, penggunaan tabel input-output 17 sektor dipilih karena data tenaga kerja nasional yang tersedia dalam publikasi BPS juga disajikan dalam klasifikasi 17 lapangan usaha utama, sehingga memudahkan proses analisis pengganda tenaga kerja.

Data lain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu literatur, publikasi BPS, peraturan perundang-undangan, dan artikel berita. Adapun data-data yang digunakan dalam analisis input-output pada penelitian ini adalah:

Tabel input-output Indonesia tahun 2016 dengan agregasi 17 sektor ekonomi yang diperoleh dari BPS.

Penjualan (dalam satuan unit) untuk setiap varian mobil yang memperoleh fasilitas pada periode Maret-Desember 2020 dan Maret-Desember 2021 (periode pemberian fasilitas PPnBM

kendaraan bermotor DTP), yang diperoleh dari Gaikindo (2021, 2022). Daftar mobil yang memperoleh fasilitas PPnBM diperoleh dari Kementerian Perindustrian RI (2021a, 2021b).

Harga pasar mobil (setelah insentif PPnBM) yang diperoleh dari penelusuran berbagai sumber di internet. Harga yang digunakan merupakan harga varian kendaraan dengan spesifikasi terendah sebagai pendekatan konservatif dalam estimasi nilai transaksi.

Kenaikan penjualan mobil (dalam rupiah) pada mobil-mobil yang mendapat fasilitas PPnBM DTP pada tahun 2021 yang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah kenaikan unit penjualan mobil sebagaimana dimaksud pada angka (2) dengan harga mobil pada tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka (3) setelah dikurangi margin dan PPN. Nilai kenaikan penjualan ini kemudian digunakan sebagai variabel eksogen berupa shock pada permintaan akhir dalam model input–output.

Komposisi tenaga kerja per lapangan usaha utama (17 sektor perekonomian) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2023).

Tabel Input–Output (IO) Indonesia menyajikan gambaran mengenai hubungan timbal balik dan keterkaitan antar sektor perekonomian dalam suatu sistem ekonomi. Tabel IO disajikan dalam bentuk matriks, di mana setiap baris menunjukkan bagaimana output suatu sektor didistribusikan untuk memenuhi permintaan antara maupun permintaan akhir. Sebaliknya, setiap kolom menunjukkan bagaimana suatu sektor menggunakan input antara dan input primer dalam proses produksinya (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tabel 1. Tabel Input Output Jika Sistem Perekonomian Memiliki Tiga Sektor Produksi

| Alokasi Output Struktur Input | | | Permintaan Antara | | | Permintaan Akhir | Jumlah Output |
|----------------------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|----------|------------------|---------------|
| | | | Sektor Produksi | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | |
| Input Antara | Sektor Produksi | 1 | X_{11} | X_{12} | X_{13} | F_1 | X_1 |
| | 2 | X_{21} | X_{22} | X_{23} | F_2 | X_2 | |
| | 3 | X_{31} | X_{32} | X_{33} | F_3 | X_3 | |
| Input Primer | | | V_1 | V_2 | V_3 | | |
| Jumlah Input | | | X_1 | X_2 | X_3 | | |

Sumber: BPS (n.d.)

Tabel 1 memberikan gambaran sederhana struktur tabel input output yang digunakan pada penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan struktur tabel jika suatu perekonomian dibagi menjadi tiga sektor perekonomian sementara dalam penelitian ini akan menggunakan tabel input-output jika perekonomian dibagi menjadi 17 sektor. BPS (n.d.) menjelaskan, pada tabel 1 berlaku persamaan sebagai berikut.

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} + F_i = X_i \quad \dots (1)$$

Keterangan:

x_{ij} = output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j

F_{ij} = permintaan akhir terhadap sektor i

X_i = jumlah output sektor i

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} + V_j = X_j \quad \dots (2)$$

Keterangan:

V_j = input primer sektor j

X_j = jumlah input sektor j

Output Multiplier

Badan Kebijakan Fiskal (2010) menjelaskan bahwa untuk memperoleh angka pengganda output pada suatu sektor ekonomi dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} \quad \dots (3)$$

$$A \quad x + F = X$$

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \quad \dots (4)$$

Pengganda output (output multiplier) digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan total output perekonomian yang dihasilkan akibat peningkatan permintaan akhir pada suatu sektor ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan permintaan akhir berasal dari kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang memperoleh fasilitas PPnBM DTP.

Persamaan (3) dapat dinyatakan dalam bentuk lain sebagai berikut:

$$[I - A] X = F \quad \dots (5)$$

$$X = [I - A]^{-1} F \quad \dots (6)$$

Keterangan:

a_{ij} = jumlah input sektor i yang dibutuhkan untuk satu unit output sektor j

A = matriks a_{ij} (koefisien input-output)

[I - A] = matriks leontif

[I - A]⁻¹ = matriks *inverse* leontif

F = permintaan akhir yang bersifat eksogen

X = total output yang ditentukan dengan memasukkan berbagai nilai eksogen F

Untuk memperoleh angka pengganda tenaga kerja dapat digunakan persamaan berikut yang penulis modifikasi dari Badan Kebijakan Fiskal (2010).

$$M_{TK} = \hat{L} [I - A]^{-1} \quad \dots (7)$$

$$L_j = \frac{TK_j}{X_j} \quad \dots (8)$$

Keterangan:

M_{TK} = multiplier tenaga kerja

L_j = koefisien tenaga kerja sektor J (jumlah tenaga kerja per total input sektor J)

\hat{L} = matriks diagonal koefisien tenaga kerja (L_j)

$[I - A]^{-1}$ = matriks *inverse* leontif

Pengganda tenaga kerja digunakan untuk mengestimasi jumlah tenaga kerja tambahan yang tercipta akibat peningkatan output ekonomi pada masing-masing sektor sebagai dampak dari shock permintaan akhir.

Dalam menghitung efek pengganda, penulis menggunakan tabel input-output *non competitive import type* yang memisahkan input-output domestik dan impor. Dietzenbacher et al. (2005) menjelaskan bahwa pengambilan kesimpulan melalui tabel input-output *competitive import type* akan menyebabkan hasil *simple output multiplier* menjadi *overestimate*, tidak realistis, dan bias. Oleh karena itu penulis menggunakan tabel input-output *non competitive import type* agar dapat menggambarkan dampak pengganda pada perekonomian Indonesia dengan lebih baik.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai proses penelitian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi sektor ekonomi yang terdampak kebijakan
Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi sektor ekonomi yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan insentif PPnBM kendaraan bermotor DTP, yaitu sektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya.
2. Estimasi peningkatan permintaan akhir
Tahap kedua dilakukan dengan menghitung kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang memperoleh fasilitas PPnBM DTP. Estimasi dilakukan dengan membandingkan jumlah penjualan kendaraan pada periode sebelum dan selama pemberian insentif, kemudian dikalikan dengan harga kendaraan setelah insentif PPnBM.
3. Penentuan shock permintaan akhir dalam model input–output
Nilai kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang telah dihitung kemudian dimasukkan sebagai shock permintaan akhir (*final demand shock*) pada sektor perdagangan kendaraan bermotor dalam model input–output.
4. Perhitungan pengganda output perekonomian
Shock permintaan akhir tersebut kemudian dianalisis menggunakan matriks *inverse* Leontief untuk memperoleh dampak total terhadap output perekonomian nasional melalui perhitungan output multiplier.
5. Perhitungan pengganda tenaga kerja
Tahap berikutnya adalah menghitung dampak peningkatan output ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan koefisien tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi.
6. Analisis dampak ekonomi antar sektor
Tahap terakhir adalah menganalisis hasil simulasi untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memperoleh dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan insentif PPnBM kendaraan bermotor DTP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Insentif Perpajakan

Insentif perpajakan merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan ekonomi tertentu (PBB & CIAT, 2018). Lebih lanjut, United Nations dan CIAT menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan suatu perlakuan pajak istimewa terhadap golongan wajib pajak

tertentu dalam bentuk pengecualian, *tax holiday*, kredit, *investment allowance*, tarif pajak dan tarif impor preferen, dan penundaan pembayaran pajak. United Nations dan CIAT mengemukakan bahwa secara umum insentif pajak digunakan untuk: (1) mengoreksi inefisiensi pasar akibat eksternalitas dari suatu kegiatan ekonomi tertentu; (2) mendorong daya saing industri baru dan industri *mobile*; (3) membentuk aglomerasi ekonomi atau konsentrasi eksternalitas; (4) memberi subsidi pada sektor ekonomi yang sedang terpuruk.

Dalam dalam Laporan OECD berjudul *Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis* (2020), OECD memberikan pedoman atas kebijakan perpajakan dan fiskal yang sebaiknya dilakukan sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi. Salah satu poin yang ditekankan dalam laporan tersebut adalah mendorong konsumsi yang kuat menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi. Hal ini sejatinya sejalan dengan narasi salah satu tujuan pemberian fasilitas perpajakan menurut United Nation dan CIAT (2018), yaitu memberi subsidi pada sektor ekonomi yang sedang terpuruk.

Selama periode 2020 hingga 2021 banyak negara telah memberikan kebijakan dalam bentuk insentif terhadap pajak konsumsi (OECD, 2021). Lebih lanjut OECD menjelaskan bahwa tren insentif pajak atas konsumsi pada awal pandemi bertujuan untuk menurunkan biaya kepatuhan, seperti insentif penundaan pelaporan dan pembayaran, dan meringankan likuiditas perusahaan, seperti percepatan restitusi PPN. Setelah pembatasan kegiatan berangsur dikurangi, negara-negara mulai memberikan insentif seperti penurunan tarif sementara, umumnya dilakukan kepada sektor-sektor tertentu sebagai upaya meningkatkan konsumsi dan dukungan terhadap sektor bisnis yang terdampak signifikan.

Dalam insentif perpajakan dikenal suatu konsep yang disebut belanja perpajakan (*Tax Expenditure*). Anderson dalam OECD (2010) mendefinisikan *Tax expenditure* sebagai ketentuan, regulasi, atau praktik yang mengurangi pendapatan yang dapat dipajaki atau menunda pemajakan. Dalam artikel yang sama, Kran mendefinisikan *Tax Expenditure* sebagai transfer sumber daya publik dengan cara mengurangi kewajiban pajak melalui perlakuan pajak yang berbeda dari ketentuan yang berlaku umum. *Tax Expenditure* menyebabkan sebagian atau seluruh pajak yang seharusnya merupakan pendapatan negara menjadi hilang (*revenue forgone*).

Fasilitas PPnBM DTP atas kendaraan bermotor merupakan sebuah belanja perpajakan dengan tujuan untuk mendukung dunia bisnis (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Fasilitas ini merupakan belanja perpajakan karena pajak yang terutang atas penjualan kendaraan bermotor tersebut tidak perlu dibayar oleh wajib pajak melainkan ditanggung oleh pemerintah (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Skema tersebut menyebabkan hilangnya penerimaan negara (*revenue forgone*).

Sebagai konsekuensi atas hilangnya pendapatan negara, pemberian belanja perpajakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Insentif perpajakan bisa saja tidak mencapai tujuan yang diharapkan namun terlanjur menimbulkan kehilangan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan. Keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam pemberian insentif pajak adalah tantangan utama dalam menyusun kebijakan insentif perpajakan (OECD, 2022). Insentif perpajakan hanya dibenarkan apabila manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungannya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (UN CEPAL & OXFAM, 2020). Dalam konteks ini, analisis dampak memegang peran penting dalam meninjau suatu kebijakan insentif perpajakan.

Beer et al. (2022) dalam artikelnya untuk IMF menyebutkan bahwa analisis input-output merupakan alat yang lazim digunakan dalam menganalisis dampak suatu insentif perpajakan. Analisis input-output adalah alat yang baik untuk digunakan karena dapat memberikan gambaran bagaimana insentif perpajakan dalam suatu sektor ekonomi dapat memberikan efek pengganda (*multiplier*) dalam perekonomian dan dapat menjelaskan bagaimana dampak

tersebut terdistribusi pada masing-masing sektor perekonomian (*spill over*) (Chen, 2015). Efek pengganda yang dimaksud dapat berupa penggandaan output perekonomian maupun penggandaan tenaga kerja sebagaimana yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian terkait dampak suatu insentif perpajakan menggunakan analisis input output telah dilakukan sebelumnya. Calitz et al., (2013) menggunakan analisis SAM, yang merupakan pengembangan dari analisis input-output milik Leontief (1936), untuk menganalisis dampak insentif perpajakan terhadap investasi di Afrika Selatan. Abdullah (2018) menganalisis dampak dari kebijakan fiskal Indonesia yang mendorong transfer teknologi hijau menggunakan analisis input-output *multi-region*. Pada penelitian ini analisis input output digunakan untuk mengetahui dampak insentif PPnBM kendaraan bermotor DTP pada tahun 2021.

Dalam tabel input Indonesia 17 sektor, sektor perdagangan otomotif digolongkan ke dalam sektor ketujuh yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor. Sektor ini mencakup tiga subsektor yaitu, Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; serta Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (Badan Pusat Statistik, 2020)

Tabel 2. Tabel Output dan Labour Multiplier Effect per Sektor Ekonomi

| No. | Sektor Perekonomian | Output Multiplier | Labour Multiplier | |
|-----|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Per Juta Output | Rp1 Per 1 Tenaga Kerja |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,3069 | 0,0218 | 1,1152 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1,4790 | 0,0031 | 2,5123 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,8452 | 0,0087 | 3,1631 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2,6056 | 0,0032 | 7,4424 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang | 1,4527 | 0,0122 | 1,2199 |
| 6 | Konstruksi | 1,8614 | 0,0073 | 2,5521 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,4379 | 0,0125 | 1,1704 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,8046 | 0,0076 | 2,0660 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 1,7287 | 0,0159 | 1,5735 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,5889 | 0,0034 | 2,5009 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,3841 | 0,0037 | 1,6492 |
| 12 | Real Estate | 1,3653 | 0,0019 | 3,9991 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,6154 | 0,0059 | 1,8406 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1,7023 | 0,0099 | 1,5627 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,4916 | 0,0130 | 1,2321 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,7309 | 0,0114 | 1,4923 |
| 17 | Jasa Lainnya | 1,6272 | 0,0175 | 1,2117 |

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel 2 dapat diamati bahwa sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki angka *multiplier* output sebesar 1,4379. Hal ini berarti bahwa kenaikan permintaan akhir sebesar Rp 1 pada sektor ini akan meningkatkan total output dalam perekonomian sebesar Rp1,4379. Dengan menggunakan *shock* berupa estimasi kenaikan nilai penjualan mobil yang diberikan fasilitas PPnBM pada tahun 2021 sebesar Rp45,40 triliun sebagaimana tercantum pada lampiran, output total yang dihasilkan pada perekonomian secara keseluruhan adalah sebesar Rp65,28 triliun. Dengan kata lain, kenaikan Rp45,40 triliun pada

permintaan akhir sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, menciptakan tambahan Rp19,87 triliun output pada sektor lainnya dalam perekonomian.

Pada tabel 3 dapat diamati bagaimana efek pengganda ini terdistribusi pada setiap sektor perekonomian. Tiga sektor perekonomian dengan *spill over effect* pada output terbesar secara berurutan adalah Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Transportasi dan Pergudangan, dengan nilai masing-masing sebesar Rp5,23 triliun; Rp2,45 triliun; dan Rp2,12 triliun.

Tabel 3. Distribusi Efek Pengganda dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor akibat shock yang terjadi

| No. | Sektor Perekonomian | Distribusi Angka Pengganda (per Rp 1 juta) | Distibusi Efek Pengganda dalam Rupiah |
|--------------|---|--|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,0182 | 824.644.244.501 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,0127 | 575.050.713.286 |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,1153 | 5.234.243.798.931 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,0224 | 1.018.781.811.667 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang | 0,0009 | 38.832.191.979 |
| 6 | Konstruksi | 0,0121 | 549.717.447.040 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,0409 | 47.260.563.937.013 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,0469 | 2.128.282.332.756 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 0,0101 | 456.338.696.219 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,0336 | 1.526.392.367.583 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,0541 | 2.456.112.050.060 |
| 12 | Real Estate | 0,0314 | 1.426.953.245.984 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,0302 | 1.372.638.784.405 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 0,0030 | 137.650.378.957 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,0014 | 62.200.997.662 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,0016 | 74.781.486.843 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,0031 | 138.567.582.444 |
| Total | | 1,4379 | 65.281.752.067.329 |

Sumber: Diolah dari BPS (2021)

Berdasarkan tabel 3 kolom (4) diketahui bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki angka pengganda tenaga kerja sebesar 0,0125. Hal ini dimaknai bahwa penambahan Rp 1 juta output pada sektor tersebut menciptakan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,0125 orang. Sementara itu, pada tabel 2 baris 7 kolom (5) menunjukkan angka 1,704 yang berarti bahwa penambahan 1 orang tenaga kerja dalam sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebagai akibat kenaikan permintaan akhir, akan menyebabkan tambahan tenaga kerja total pada perekonomian sebesar 1,704 orang.

Tabel 4 menggambarkan bagaimana distribusi efek pengganda tenaga kerja yang terjadi akibat adanya *shock* sebagaimana tercantum dalam lampiran, yaitu sebesar Rp45,40 triliun, pada setiap sektor perekonomian. Pada tabel 4 dapat diamati bahwa total penciptaan tenaga kerja yang terjadi akibat adanya *shock* adalah sebesar 567.154 dengan penciptaan tenaga kerja terbanyak terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan jumlah 504.397 tenaga kerja. Dengan kata lain, ada tambahan sebesar 62.757 tenaga kerja pada sektor lain dalam perekonomian. Sementara itu, tiga sektor lain dengan efek penggandaan tenaga kerja terbesar secara berurutan adalah Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan; Industri Pengolahan; dan Transportasi dan Pergudangan. Pada masing-masing sektor tersebut terjadi penciptaan tenaga kerja sebesar 16.131; 14.350; dan 7.799 tenaga kerja.

Tabel 4. Distribusi Efek Pengganda Tenaga Kerja Pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Akibat Shock yang Terjadi

| No. | Sektor Perekonomian | Distribusi Pengganda (per juta output) | Angka Rp 1 | Distibusi Pengganda jumlah tenaga kerja | Efek dalam |
|--------------|---|--|------------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,0003553 | | 16.131 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,0000156 | | 710 | |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,0003161 | | 14.350 | |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,0000096 | | 437 | |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang | 0,0000085 | | 387 | |
| 6 | Konstruksi | 0,0000345 | | 1.567 | |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,0111095 | | 504.397 | |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,0001718 | | 7.799 | |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 0,0001017 | | 4.618 | |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,0000455 | | 2.066 | |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,0001216 | | 5.519 | |
| 12 | Real Estate | 0,0000146 | | 663 | |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,0000971 | | 4.406 | |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 0,0000192 | | 874 | |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,0000144 | | 656 | |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,0000126 | | 571 | |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,0000441 | | 2.003 | |
| Total | | 0,0124918 | | 567.154 | |

Sumber: Diolah penulis dari BPS (2021)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian fasilitas PPnBM kendaraan bermotor DTP tidak hanya memberikan dampak langsung pada peningkatan aktivitas sektor perdagangan otomotif, tetapi juga menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) pada berbagai sektor ekonomi lainnya. Dalam perspektif teori input-output yang dikembangkan oleh Leontief, peningkatan permintaan akhir pada suatu sektor akan memicu peningkatan produksi pada sektor lain yang memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) maupun keterkaitan ke depan (forward linkage) dalam struktur perekonomian. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan pada suatu sektor tertentu dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas melalui rantai produksi antar sektor.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan spillover output terbesar setelah sektor perdagangan otomotif. Hal ini dapat dijelaskan karena industri pengolahan memiliki keterkaitan produksi yang sangat kuat dengan sektor otomotif, terutama dalam penyediaan komponen kendaraan bermotor, suku cadang, serta berbagai produk manufaktur yang mendukung aktivitas perdagangan kendaraan. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik sektor manufaktur yang dalam banyak penelitian input-output dikenal sebagai sektor dengan tingkat keterkaitan antar sektor yang relatif tinggi dalam perekonomian.

Selain sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi juga memperoleh dampak pengganda output yang cukup besar. Hal ini mencerminkan adanya keterkaitan yang erat antara peningkatan penjualan kendaraan bermotor dengan aktivitas pembiayaan kendaraan, baik melalui kredit kendaraan bermotor maupun skema pembiayaan lainnya. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Almira dan Wiagustini (2022) yang menunjukkan

bahwa insentif PPnBM kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pembiayaan sebagai bagian dari sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan dampak spillover yang signifikan. Peningkatan aktivitas perdagangan kendaraan bermotor akan meningkatkan kebutuhan distribusi logistik, pengangkutan kendaraan, serta layanan pergudangan yang berkaitan dengan rantai pasok industri otomotif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor otomotif memiliki keterkaitan yang cukup luas dengan berbagai sektor jasa dalam perekonomian.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPnBM DTP mampu menciptakan tambahan kesempatan kerja yang cukup besar, yaitu sebanyak 567.154 tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja tersebut terserap secara langsung pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki karakteristik sebagai sektor yang relatif padat karya dibandingkan beberapa sektor lain dalam perekonomian.

Selain dampak langsung pada sektor perdagangan otomotif, penelitian ini juga menemukan adanya penciptaan tenaga kerja pada sektor lain seperti pertanian, industri pengolahan, dan transportasi. Fenomena ini menunjukkan adanya efek rambatan ekonomi (*economic spillover*) dari peningkatan aktivitas perdagangan kendaraan bermotor terhadap sektor-sektor yang memiliki keterkaitan produksi maupun distribusi dengan sektor tersebut.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPnBM mampu meningkatkan penjualan kendaraan bermotor (Samudra & Wibowo, 2022; Pratama & Rezki, 2022). Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada peningkatan penjualan kendaraan, tetapi juga menghasilkan dampak makroekonomi yang lebih luas berupa peningkatan output perekonomian nasional serta penciptaan kesempatan kerja antar sektor.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam bentuk insentif pajak sektor tertentu dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya ketika kebijakan tersebut diberikan pada sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi, sektor otomotif dapat berperan sebagai salah satu sektor penggerak (*leading sector*) yang mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui efek pengganda pada berbagai sektor lainnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian fasilitas PPnBM kendaraan bermotor Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun 2021 meningkatkan permintaan akhir pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp45,40 triliun. Peningkatan permintaan tersebut menghasilkan total penambahan output perekonomian sebesar Rp65,28 triliun, yang juga memberikan dampak pengganda pada berbagai sektor ekonomi. Sektor yang menerima dampak spillover terbesar adalah Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Transportasi dan Pergudangan.

Selain meningkatkan output perekonomian, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja sebanyak 567.154 tenaga kerja, dengan sebagian besar terserap pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dampak penciptaan tenaga kerja juga terjadi pada sektor lain seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Transportasi dan Pergudangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif PPnBM DTP tidak hanya mendorong peningkatan aktivitas sektor otomotif, tetapi juga memberikan efek pengganda terhadap output perekonomian dan kesempatan kerja di berbagai sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). *Impacts of Fiscal Policy on Green Technologies Transfer*. <http://119.78.100.173/C666//handle/2XK7JSWQ/236473>
- Almira, N. P. A. K., & Wiagustini, N. L. P. (2022). Analisis Dampak Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Kendaraan Bermotor terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. *Proceeding National Conference Business, Management, and Accounting (NCBMA)*, 5(0), 113–121. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.V09.I03.P13>
- Anggraeni, D., & Mudiarti, H. (2022). Pengaruh Regulasi PPN dan PPnBM serta Pendapatan Terhadap Minat Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil) di Indonesia. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.29080/jai.v8i1.766>
- Asare Vitenu-Sackey, P., & Barfi, R. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on the Global Economy: Emphasis on Poverty Alleviation and Economic Growth. *The Economics and Finance Letters*, 8(1), 32–43. <https://doi.org/10.18488/journal.29.2021.81.32.43>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2010). *Kajian Ekonomi Keuangan*. 14(2).
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Laporan Belanja Perpajakan 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020. In *Badan Pusat Statistik*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel input-output indonesia 2016*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2022*. <https://www.bps.go.id/statistictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2022.html>
- Beer, S., Benedek, D., Erard, B., & Loeprick, J. (2022). How to Evaluate Tax Expenditures. *IMF How To Notes*, 005. <https://doi.org/10.5089/9798400221507.061.A001>
- BPS. (n.d.). *Input Output*. Diambil 28 Januari 2023, dari <https://www.bps.go.id/subject/105/input-output.html#subjekViewTab2>
- BPS. (2022). *Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010*. <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/3/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>
- Calitz, E., Wallace, S., & Burrows, L. R. (2013). *The Impact of Tax Incentives to Stimulate Investment in South Africa International Center for Public Policy The Impact of Tax Incentives to Stimulate Investment in South Africa Estian Calitz Sally Wallace Le Roux Burrows*.
- Chen, D. (2015). *The Framework for Assessing Tax Incentives : A Cost- Benefit Analysis Approach*. April, 23–24.
- Gaikindo. (2021). *Whole sales 2020*.
- Gaikindo. (2022). *Whole Sales 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor*.
- Kementerian Keuangan. (2021b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2021c). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Kementerian Perindustrian RI. (2021a). *Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Kementerian Perindustrian RI. (2021b). *Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Legese Feyisa, H. (2020). The World Economy at COVID-19 Quarantine: Contemporary Review. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 8(2), 63. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20200802.11>

- Leontief, W. W. (1936). Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the United States. *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 105. <https://doi.org/10.2307/1927837>
- OECD. (2010). *Tax Expenditures in OECD Countries*. OECD.
- OECD. (2020). *Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience*.
- OECD. (2021). *Tax Policy Reforms 2021: Special Edition on Tax Policy during the COVID-19 Pandemic*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1787/427d2616-en>
- OECD. (2022). *Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax*. OECD.
- PBB, & CIAT. (2018). *Design and Assessment of Tax Incentives in Developing Countries*.
- Pratama, R. A., & Rezki, J. F. (2022). Bagaimana Dampak Kebijakan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kendaraan Bermotor? Bukti Dari Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 89–99. <https://doi.org/10.31092/JPI.V6I1.1582>
- Samudra, R. N. A., & Wibowo, D. (2022). Analisis Pemanfaatan Sebelum dan Sesudah Insentif PPnBM DTP Terhadap Penjualan Mobil pada Perusahaan Otomotif Di Gaikindo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4871>
- Setiawan, D. A. (2021, Februari 27). *Soal Insentif PPnBM Mobil Baru, Begini Pendapat Konsumen*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/soal-insentif-ppnbm-mobil-baru-begini-pendapat-konsumen-27969>
- Siahaan, F. I. P. (2022). *Pengaruh Promosi dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0% terhadap Keputusan Pembelian Dimasa Pandemi Covid-19 Pada PT. Astra Internasional Tbk Medan*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6371>
- UN CEPAL, & OXFAM. (2020). *Tax incentives for businesses in Latin America and the Caribbean*.